



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**RENCANA KERJA
TAHUN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.	2
1.3. Maksud dan Tujuan.	6
1.4. Sistematika Penulisan.	7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN REJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin	1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.	2
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan SKPD.	3
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD.	22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.	1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-SKPD.	8
3.3. Program dan Kegiatan.	9

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 1

BAB V PENUTUP 1

Lampiran

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun. Program Renja ini merupakan kewajiban bagi SKPD. Sebagai salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi dari visi misi Bupati tapin serta penjabaran lebih lanjut dari visi misi BPBD Kabupaten Tapin.

Selanjutnya Rencana Kerja ini akan di konsultasikan lebih lanjut dengan saran dan aspirasi masyarakat serta SKPD terkait lainnya agar lebih sempurna dan tepat pada sasaran.

Kami menyadari Rencana Kerja BPBD Tahun Anggaran 2025 ini masih banyak kekurangan dan oleh karena itu perlu perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PELAKSANA,

H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19641107 198703 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD.

SKPD BPBD sebagai unit kerja Penanggulangan Bencana yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang penanggulangan dan penanganan bencana di daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan dalam pembangunan daerah. maka diperlukan BPBD yang tangguh, tangkas, tanggap dan handal dengan dukungan aparatur dan peralatan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki SKPD BPBD, maka disusunlah Renja SKPD BPBD tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 SKPD BPBD sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
36. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09); dan

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Pembangunan Daerah.
41. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Tapin tentang Renstra.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tapin.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2025 bagi SKPD BPBD, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja 2025, yaitu:

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas.
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui penyusunan perencanaan yang bertanggung jawab dalam hal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja SKPD BPBD dan Kabupaten Tapin tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap Rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan yang telah disusun.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD berdasarkan hasil Review atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Kode Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2018 - 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan(2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	13	13	13	100	13	100	100
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	100	12	100	100
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	100	100

1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	4	4	4	100	4	100	100
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	12	12	100	12	100	100
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	12	100	12	100	100
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	12	12	12	12	100	12	100	100
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	12	12	12	100	12	100	100
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	12	12	12	12	12	100	12	100	100
1.05..01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasnya Kunjungan Tamu	5	5	5	5	5	100	5	100	100
1.05..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	20	20	20	100	20	100	100
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	20	20	20	20	20	100	20	100	100
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	5	5	5	5	100	5	100	100
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	100	12	100	100
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	12	12	12	12	12	100	12	100	100

1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	70	70	70	70	70	100	70	100	100
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2	2	2	2	2	100	2	100	100
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/kel yang dilakukan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1	1	1	1	100	1	100	100
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35	100	35	100	100
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2	2	2	2	2	100	2	100	100
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	100	1	100	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Berdasarkan Capaian				Berdasarkan Realisasi Keuangan			Ket
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	persentase	
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100%	203.187.250	172.429.000	81	
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian risiko bencana yang dilegalisasi	Dokumen	1	1	100%	141.690.000	128.940.000	91	Terlaksana
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	orang	50	50	100%	61.497.250	43.489.000	71	Terlaksana
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100	100	100%	622.731.800	592.315.500	84,86	
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	70	70	100%	39.370.500	30.209.500	76,73	Terlaksana
3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	unit	2	2	100%	498.820.000	495.774.000	99,39	Terlaksana
4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/kel yang dilakukan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Desa/ Kel	1	1	100%	84.541.300	66.332.000	78,46	Terlaksana

III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	100%	119.760.440	80.111.950	74	
1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	35	35	100%	35.261.310	32.184.350	91	Terlaksana
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	2	2	100%	84.499.130	47.927.600	57	Terlaksana
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100%	27.281.446	24.045.000	88,00	
1	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	27.281.446	24.045.000	88	Terlaksana

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja BPBD
Kabupaten Tapin

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD								Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Akhir Periode	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 (tahun n+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Laju Pertumbuhan Investasi (%)			4,6	5	5,2	5,5	5,7	6	6	4,6	5	5,2	5,5	5,7	6			
2	Indeks Rasa Aman (poin)			75	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,53	75	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53			
3	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)			50	50	60	70	80	80	80	50	50	60	70	80	80			
4	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)			80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100			
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100			
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	-	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100			

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Sesuai dengan penerapan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga yang fokus terhadap penanganan kebencanaan di daerah kabupaten/kota yang bersinergi dengan lembaga/ SOPD terkait.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, berperan sebagai lembaga yang menangani masalah kebencanaan yang meliputi dari pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pada Dasarnya BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi koordinasi yaitu melaksanakan koordinasi dengan lembaga / instansi teknis lainnya secara vertikal maupun horizontal dan dengan lembaga non pemerintah.
2. Fungsi komando yaitu jika terjadi tanggap darurat bencana BPBD berfungsi sebagai komando pengendalian operasional kebencanaan di daerah dengan melibatkan semua unsur terkait.
3. Fungsi penyelenggara yaitu BPBD dapat melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan kebencanaan terdiri dari 3 macam :
 - a. Penyelenggaraan pada saat tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana.
 - b. Penyelenggaraan pada saat terjadi bencana (Tanggap Darurat) dan pemulihan.
 - c. Penyelenggara Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pasca Bencana).

Pencegahan dan Penanganan Bencana.

1. Bencana yang terjadi Selama Tahun 2023 dan Penanganannya

Wilayah Kabupaten Tapin secara topografi cukup bervariasi yang terdiri relief bagian timur merupakan dataran tinggi dengan kalkulasi 34,62 %, sedangkan bagian barat adalah daerah dataran rendah dan rawa sebesar 65,28% dengan luas wilayah 2.174.95 km terdiri dari 12 kecamatan, 125 desa, 9 kelurahan dan 14 dusun dengan

jumlah penduduk 192.149 jiwa. Berdasarkan karakteristik tersebut bencana alam yang kemungkinan terjadi di daerah Kabupaten Tapin dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Bahaya beraspek geologis, yang rawan terjadi bencana di Kabupaten Tapin adalah Tanah longsor/gerakan tanah(mass movement) yang terdapat di daerah pegunungan kecamatan Piani dan kawasan pertambangan (Kecamatan Binuang, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungun).
- b. Bahaya beraspek hidrometeorologi yang rawan terjadi di Kabupaten Tapin adalah banjir dan kekeringan. Daerah yang rawan genangan air/banjir dimusim penghujan terdapat dibagian barat kabupaten Tapin yang bemorfologi daratan rendah dan rawa terjadi di kecamatan Candilaras Selatan, Kecamatan Candilaras Utara, Kecamatan Tpin Tengah, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara termasuk kota Rantau, Kecamatan Bungur, Kecamatan Bakarangan dan Kecamatan Lokpaikat. Daerah tersebut juga merupakan daerah rawan terjadi kekeringan disaat musim kemarau.
- c. Bahaya beraspek lingkungan, yang rawan terjadi bencana di Kabupaten Tapin adalah kebakaran hutan dan lahan terdapat berapa titik panas(hotspot). Daerah rawan terjadi kebakaran hutan /lahan tersebar hamper diseluruh kecamatan.

2. Status Bencana

Bencana yang terjadi selama ini terjadi di kabupaten Tapin masih bersifat lokal dalam katagori bencana daerah terjadi pada titik tertentu saja seperti banjir pada daerah rendah, tanah longsor daerah lereng dan kebakaran hutan/lahan pada kawasan tertentu.

Pada kurun waktu tahun 2023 telah terjadi beberapa bencana alam di Kabupaten Tapin antara lain; Banjir, Tanah longsor, Kebakaran hutan/lahan dan pemukiman serta angin puting beliung sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Kejadian Bencana di Kabupaten Tapin
Tahun 2023

No	Kejadian Bencana	Frekuensi	Lokasi	Jumlah Masyarakat/Lahan Terdampak
1.	Banjir	6	Tersebar di Kab.Tapin	596 KK terdampak, 1761 jiwa terdampak
2.	Tanah longsor	1	Desa Padang Sari (Dusun Gunung Kampil) RT.003 RW.01 Kec. Binuang Kab. Tapin	48 KK terdampak, 130 jiwa terdampak, 7 buah tiang listrik rusak dan 3 diantaranya hilang tertimbun, Pipa HDP Pansimas Desa Padang Sari terputus -+250m, menutup jalan -+150m, Aliran sungai yang tersumbat akibat tanah longsor merendam - +20Ha (Hektare) kebun karet warga
3.	Puting Beliung	9	Tersebar di Kab.Tapin	20 KK terdampak, 65 jiwa terdampak dan pohon tumbang
4.	Kebakaran hutan /Lahan	129	Tersebar di Kab.Tapin	363,99 Ha (318,15 Ha lahan semak belukar + 45,84 Ha Perkebunan) terbakar
5	Kebakaran Pemukiman	8	Tersebar di Kab.Tapin	18 KK terdampak, 46 jiwa terdampak
Total		153	kali kejadian	

Sumber : Bidang Kedaruratan & Logistik, Pusdalops BPBD Kabupaten Tapin, 2023

Penanggulangan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Tapin adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Setelah menerima laporan kejadian bencana, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Tapin melakukan kaji cepat dilapangan untuk melihat seberapa besar korban yang terkena dampak serta kerugian dan kerusakan yang terjadi. Apabila diperlukan tempat untuk mengungsi maka TRC akan mencari lokasi evakuasi sebagai point rescue bagi pengungsi termasuk untuk dapur umum dan pos kesehatan.

- b. TRC akan mendirikan posko di tempat lokasi kejadian bencana sebagai pusat komando penanggulangan bencana.
- c. TRC akan membuat status keadaan darurat dengan membuat rekomendasi kepada kepala BPBD yang akan membuat telaahan staf kepada Bupati Tapin untuk kemudian dikeluarkannya pernyataan Status Bencana dengan masa tanggap darurat selama 7 (tujuh) hari dan bisa diperpanjang sesuai situasi dan kondisi yang terjadi.
- d. Dalam hitungan waktu 1x24 jam masyarakat korban bencana sudah mendapatkan bantuan pertama yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tapin
- e. Setelah masa tanggap darurat ditetapkan maka semua sumberdaya baik personil, logistik, peralatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh semua instansi terkait yang sudah terdata di BPBD Kabupaten Tapin akan dikerahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat korban bencana.

Selama masa tanggap darurat korban bencana harus mendapatkan standar kebutuhan dasar minimal yang sudah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 pasal 26 tentang Penanggulangan Bencana.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran/dana dalam penanggulangan bencana selama tahun 2023 di Kabupaten Tapin tidak memakai Belanja Tak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan sumberdana lainnya bersumber dari SKPD terkait dan sumber lainnya yang sah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.2.
Dana Tanggap Darurat Sumber Dana APBD Kab. Tapin
Belanja Tak Terduga BKAD Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Waktu (Bulan)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pelaksana Kegiatan
1	Penanganan Karhutla	Kab. Tapin	Agustus – September	Rp. 273.450.000	Rp. 269.466.000	Apel, Rakor, Posko Gabungan , Penangan an Karhutla
2	Penanganan Karhutla di Kecamatan	11 Kecamatan di Kab.Tapin	Agustus – September	Rp. 284.572.600	Rp. 284.050.000	Posko Gabungan , Penangan a Karhutla
3	Penaganan Karhutla Lanjutan	Kab. Tapin	Oktober - Nopember	Rp. 185.909.368	Rp. 181.217.000	Posko Gabungan , Penangan ann Karhutla
4	Rehab Pasca Bencana MIN 6 Tapin	Kecamatan Bungur Kab. Tapin	September - Oktober	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Rehab Pasca Bencana MIN 6 Tapin

Sumber : Kasubbag. Keuangan Sekretariat BPBD Kab. Tapin, Tahun 2023

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi kemungkinan Bencana

Dalam menghadapi kemungkinan bencana Pemerintah Kabupaten Tapin melalui BPBD Kabupaten Tapin melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (UU No. 24/2007). Kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan yang bisa dilakukan adalah :

4.1 Membuat Peta Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Tapin telah memiliki profil daerah Rawan Bencana bekerjasama dan dengan pihak pihak ketiga sumber dana APBD Tapin Tahun 2018 yang memuat tentang karakteristik dan potensi bencana serta peta daerah rawan bencana.

Penanggulangan dengan adanya profil daerah rawan bencana tersebut kedepan kita dapat mengantisipasi minimal mengurangi resiko atau dampak bencana melalui penyusunan program dan kegiatan dengan melibatkan stackholder yang ada kolerasinya dengan penanganan bencana serta melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan Pengusaha dan unsur-ansur lainnya.Pada dasarnya bencana yang terjadi di Kabupaten Tapin.

4.2 Membentuk TRC (Tim Reaksi Cepat)

Tim Reaksi Cepat adalah sukarelawan yang siap siaga terjun ke medan bencana membantu penanganan bencana yang terjadi diwilayah Kabupaten Tapin dengan tugasevakuasi, pencarian korban, pedataan dan pelayanan dapur umum. TRC ini beranggotakan dari beberapa unsur yaitu :

Tabel. 2.3.
Tabel Anggota TRC berdasarkan jumlah dan Instansi/ Lembaga
Tahun Anggaran 2023

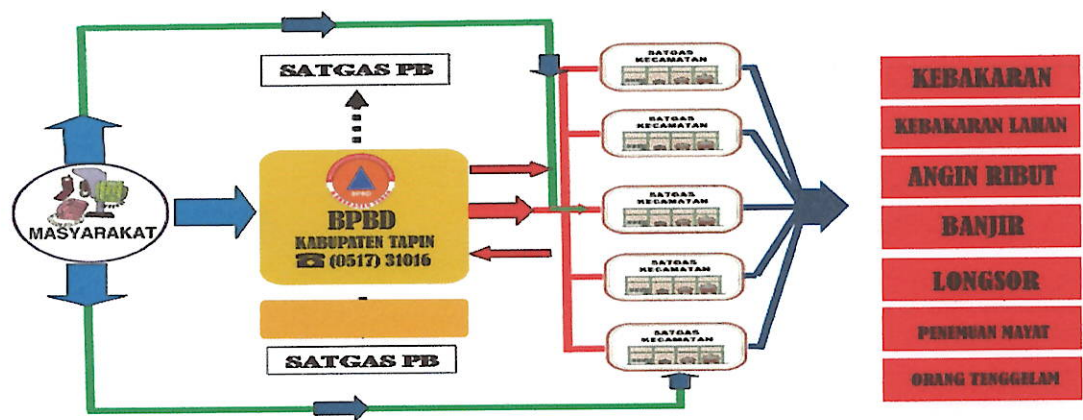
No	Instansi/ Lembaga	Jumlah
1	TNI	1 orang
2	POLRI	1 orang
3	BPBD	14 orang
4	BAPPELITBANGDA	1 orang
5	DINKES	1 orang
6	Dinas Pendidikan	1 orang
7	Dinas PU	1 orang
8	Dinas Sosial	1 orang
9	Dinas Pertanian	1 orang
10	Dinas Perikanan	1 orang
11	DISPERKIM	1 orang
12	Satpol PP dan Damkar	1 orang
TOTAL		25 orang

Sumber : Bidang Kedaruratan & Logistik, Pusdalops BPBD Kabupaten Tapin, 2023

4.3 Membuat Prosedur Tetap, Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis

Untuk sementara ini BPBD Kabupaten Tapin masih belum memiliki prosedur, petunjuk pelaksana dalam penangannan bencana akan tetapi kami berupaya bekerja semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat terkena musibah bencana dan pada Tahun 2016 telah membuat rancangan Peraturan Bupati Tapin Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Akibat Bencana serta perda yang mengatur tentang kebencanaan.

SKEMA PELAPORAN DAN PELAYANAN BILA TERJADI BENCANA



4.4 Penanganan Kerusakan Bencana

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tata ruang menjadi salah satu potensi ancaman bagi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tapin menerapkan dengan ketat aturan pemberian perijinan pemanfaatan ruang seperti AMDAL, UKL-UPL yang dikelola oleh DLH Kabupaten Tapin.

Untuk lahan kritis yang terjadi dilakukan upaya-upaya penghijauan dan reboisasi oleh Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dengan menerapkan pengolahan lahan berwawasan lingkungan. Reklamasi kawasan tambang pun menjadi tugas Dinas Pertambangan Propinsi dan Dinas

Lingkungan Hidup untuk menjamin bahwa Dokumen lingkungan yang dibuat dijalankan dengan baik dan benar oleh perusahaan tambang.

Kerusakan yang berakibat pada fasilitas umum seperti jalan dan jembatan dilakukan perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

4.5 Pembuatan brosur, leaflet, poster

Pada tahun 2023 BPBD Kabupaten Tapin telah membuat Brosur, stiker, leaflet maupun spanduk menjadi media informasi bagi BPBD Kabupaten Tapin dalam menyampaikan himbauan, pesan maupun peringatan bagi masyarakat sehingga kewaspadaan masyarakat terutama dalam menghadapi ancaman bencana tentang bencana banjir, kebakaran hutan lahan, tanah longsor dan angin puting beliung.

4.6 Pelatihan Dasar Kebencanaan Bagi Masyarakat dan Aparat

BPBD Kabupaten Tapin dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan aparaturnya dalam Penanggulangan Bencana telah melakukan pelatihan dan sosialisasi berupa ;

1. Pelatihan, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya selama 1 hari peserta sebanyak 25 orang dari unsur TRC (Tim Reaksi Cepat).
2. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dengan peserta sebanyak 300 orang dari unsur aparat kecamatan dan desa serta masyarakat lainnya.

4.7 Pembuatan Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Pembuatan Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin ini bertujuan agar dapat mengetahui, menentukan langkah dan melaksanakan kegiatan saat pra bencana, terjadinya bencana dan pasca bencana

yang dihadapi serta penanggulangannya di wilayah Kabupaten Tapin agar kejadian bencana tidak meluas.

4.8 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin ini bertujuan agar dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di kabupaten tapin, maka perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Tapin agar kejadian bencana tidak meluas.

4.9 Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir di Kabupaten Tapin.

Penyusunan kontinjensi Banjir merupakan salah satu dari berbagai rencana yang digunakan dalam siklus manajemen risiko. Rencana kontijensi dilakukan ketika terdapat potensi untuk terjadinya bencana atau pada tahap aktivitas kesiapsiagaan. Siklus manajemen risiko tersebut (termasuk perencanaan kontijensi) digunakan dalam pengelolaan bencana berbasis kewilayahan

Karena pentingnya rencana kontijensi dilakukan agar dapat memperkirakan dampak yang terjadi ketika bencana terjadi dengan lebih siap dan mengurangi risiko bencana seperti korban jiwa dan harta benda.

4.10 Sosialisasi Pencegahan Dini.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespon dan memitigasi dampak/risiko bencana serta meningkatnya taraf kehidupan dan ekonomi masyarakat. Dengan konsep, bahwa risiko bencana selalu ada dan tinggi dengan adanya bahaya dan kerentanan di masyarakat, maka risiko dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas yang ada di masyarakat pula. Maka upaya pengurangan risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas

masyarakat dan mengurangi kerentanan yang ada di masyarakat melalui Kegiatan Sosialisasi.

4.11 Pembentukan Posko Gabungan.

Sebagai Koordinator penanggulangan penanganan bencana ingin menyatukan langkah dalam pencegahan dan penanganan saat terjadinya bencana, melalui langkah bersama ini untuk mengantisipasi bencana yang lebih besar dan meluas lagi perlu untuk antisipasi dan keterpaduan penanggulangan bencana, dalam keadaan terjadinya bencana perlu penanganan secara cepat, tepat, efisien, terpadu dan akuntabel dengan membentuk Posko Gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, POLRI, Dinas terkait, Organisasi terkait dan Relawan di Kabupaten Tapin.

4.12 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Desa tangguh Bencana di Kabupaten Tapin berada di Desa Hiyung Kecamatan Tapin Tengah, Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang dan Desa Buas-Buas Kecamatan Candi Laras Utara, di desa ini sangat sering terjadinya bencana karhutla dan angin puting beliung yang setiap tahun melanda desa tersebut. Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Sesuai dengan kondisi alam dan geologis Kabupaten Tapin memiliki potensi bencana yang akan terjadi sesuai karakteristik wilayah dapat dikelompokkan :

- a. Bahaya beraspek geologis, yang rawan terjadi bencana di Kabupaten Tapin adalah Tanah longsor/gerakan tanah (mass movement) yang terdapat di daerah pegunungan kecamatan Piani dan kawasan pertambangan (Kecamatan Binuang, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungun).
- b. Bahaya beraspek hidrometeorologi yang rawan terjadi di Kabupaten Tapin adalah banjir dan kekeringan. Daerah yang rawan genangan air/banjir dimusim penghujan terdapat dibagian barat Kabupaten Tapin yang bemorfologi daratan rendah dan rawa terjadi di kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Candilaras Utara, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara termasuk kota Rantau, Kecamatan Bungur, Kecamatan

Bakarangan dan Kecamatan Lokpaikat. Daerah tersebut juga merupakan daerah rawan terjadi kekeringan disaat musim kemarau.

- c. Bahaya beraspek lingkungan, yang rawan terjadi bencana di Kabupaten Tapin adalah kebakaran hutan dan lahan terdapat berapa titik panas (hotspot). Daerah rawan terjadi kebakaran hutan /lahan tersebar diseluruh kecamatan se Kabupaten Tapin yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel.2.4.
Tabel Identifikasi Rawan Bencana
di Kabupaten Tapin

No.	KECAMATAN	IDENTIFIKASI RAWAN BENCANA		
		LONGSOR	BANJIR	KEBAKARAN
1	Binuang	O	V	V
2	Tapin selatan	O	V	V
3	Tapin Tengah	O	V	V
4	Tapin Utara	O	V	V
5	Candi Laras Selatan	V	V	V
6	Candi Laras Utara	O	V	V
7	Piani	V	V	V
8	Bakarangan	V	V	V
9	Bungur	V	V	V
10	Lokpaikat	V	V	V
11	Salam babaris	O	V	V
12	Hatungun	V	V	V

Sumber : Bidang Kedaruratan & Logistik, Pusdalops BPBD Kabupaten Tapin, Tahun 2023.

Keterangan :

X = Tidak Terjadi, O = mungkin Terjadi, V = Telah Terjadi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Urusan Bencana

1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang penanggulangan bencana, yang mengatur mengenai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara.

Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi melaksanakan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota khususnya dalam pemenuhan anggaran sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat, salah satunya penerapan Rancangan Permendagri yang tentang nomenklatur program dan kegiatan Penyelenggaraan Bencana.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

Pertama, pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu

untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

Ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Salah satu tujuan penerapan SPM adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya konstitusional setiap warga negara. Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM sub urusan Bencana selama 1 (satu) tahun. Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.5.
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Tahun Anggaran 2023

Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target (%)
Jenis Pelayanan Dasar			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	100
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	100
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	100
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	100
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah <i>zoonosis</i> prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	100
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan dalam Pencapaian SPM sub urusan Bencana BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6
Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Tahun Anggaran 2023

Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
Jenis Pelayanan Dasar				
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	100	100
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	100	100
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	100	100
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100	100
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah <i>zoonosis</i> prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	100	100
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100	100
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	100	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100	100

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

Tahun Anggaran 2023, memiliki Alokasi Anggaran untuk melaksanakan Pencapaian SPM sub urusan Bencana sebagai berikut :

Tabel. 2.7.
Alokasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Tahun Anggaran 2023

Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Jenis Pelayanan Dasar					
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	141.690.000	128,940,000	91.00
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	61.497.250	43,489,000	70,72
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	-	-	-
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	-	-	-
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	39.370.500	30,209,500	76,73
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	498.820.000	495,774,000	99,39
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	-	-	-
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	-	-	-
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	84.499.130	32,184,350	56,72
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	-	-	-

4.1.5. Dukungan Personil

Personil dalam penerapan SPM sub urusan Bencana dengan personil ASN sebanyak 14 orang dibantu 6 orang tenaga kontrak Administrasi, 12 orang Satgas dan 6 orang Operator Pusdalops, 2 orang petugas keamanan kantor serta 2 orang

petugas kebersihan. Untuk lebih jelasnya komposisi PNS BPBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8.
Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan s/d akhir Desember 2023

No	Nama dan NIP	Latar Belakang Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jabatan/Pangkat/Golongan
1	H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP 196411071987031009	Magister Administrasi Publik	S-2	Kepala Pelaksana / Pembina Utama Muda/IV.c
2	AHMAD RIZALI, ST 19730622 199803 1 012	Sarjana Teknik	S-1	Sekretaris/Pembina Tingkat I /IV.b
3	H. SYAHRADI, S.IP, MM 19720808 199203 1 006	Magister Manajemen	S-2	Kabid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan/Pembina/IV.a
4	H. A. SYOFYAN, S.AP, MM 19770221 199803 1 009	Magister Manajemen	S-2	Kabid Kedaruratan dan Logistik/Pembina I/IV.a
5	ALPIAN ANSHARY, SE, MM 19720911 200604 1 005	Magister Manajemen	S-2	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Pembina/IV.a
6	DIDIK SUGITO, S. Kom 19820309 200904 1 004	Sarjana Komputer	S-1	Kabid.Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Penata Tingkat I /III.d
7	GITA RAMADHANA, S.Kom 19870508 200904 2 004	Sarjana Komputer	S-1	Kasubbag.Program dan Pelaporan /Penata Tingkat I /III.d
8	KHAIRANI, S.Sos 19710818 199203 1 012	Sarjana Sosial	S-1	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Penata Tingkat I/III.d
9	Hj. HERLIANA, S.AP 19720402 200604 2 017	Sarjana Adm. Publik	S-1	Kasubbag.Umum dan Kepegawaian/Penata /III.c
10	YESTHITA A.W, ST 19841105 201503 2 001	Sarjana Teknik	S-1	Pranata Bencana / Penata Muda Tingkat I /III.b
11	RAHMAD FAJAR, S.T 19940721 201903 1 002	Sarjana Teknik	S-1	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan/Penata Muda / III.a
12	MUHAMMAD AINI 19740416 200604 1 008	SLTA	SLTA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Penata Muda/III.a
13	RAMADHANI 19740914 200604 1 003	SLTA	SLTA	Bendahara Pengeluaran /Penata Muda/III.a
14	RUSDIANA 19741112 2007012 019	SLTA	SLTA	Pengelola Logistik/Pengatur Tingkat /III.a

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2023

Tabel.2.9.
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Jabatan
s/d akhir Desember 2023.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	JAINI, ME	TENAGA ADMINISTRASI	
2	WAHIDAH, S.Pd	TENAGA ADMINISTRASI	
3	M. ALI NORDIN, S.Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
4	TAUPIK NOR RAHMAN, S. Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
5	SITI FATIMAH, S. Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
6	SITI KAMILA	TENAGA ADMINISTRASI	
7	RAHMANI, S.Kom	TENAGA PUSDALOPS	
8	M. NAJMI FADILAH, S.Kom	TENAGA PUSDALOPS	
9	RAHMAT AMRULLAH, S. Kom	TENAGA PUSDALOPS	
10	M. IKHSAN	TENAGA PUSDALOPS	
11	SABIRIN	TENAGA PUSDALOPS	
12	AHMAD DAHLAN	TENAGA PUSDALOPS	
13	M. DHIKA ABDILAH	SATUAN PETUGAS	
14	SYAFRUDIN	SATUAN PETUGAS	
15	SYAHYUDIN NOOR	SATUAN PETUGAS	
16	RIYANDIE PRANA BAKTI	SATUAN PETUGAS	
17	M. SYAFWAN ZAIDAN	SATUAN PETUGAS	
18	M. AZRUL AZIS	SATUAN PETUGAS	
19	JAILANI	SATUAN PETUGAS	
20	M. USTAZA	SATUAN PETUGAS	
21	TAUFIK RAHMAN	SATUAN PETUGAS	
22	BAHRUDIN	SATUAN PETUGAS	
23	M. MUGNI MARHABAN	SATUAN PETUGAS	
24	MUHAMMAD AHYAT	SATUAN PETUGAS	
25	M. HAIQAL AKBAR LUBIS	SATUAN PETUGAS	
26	DAIDIN	PETUGAS KEBERSIHAN	
27	RASYIDI	PETUGAS KEBERSIHAN	
28	RISNADI	PETUGAS KEAMANAN	

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2023

5. Permasalahan dan Solusi dalam penerapan SPM

a. Permasalahan

1. Masih kurangnya dukungan anggaran khusus dalam pelaksanaan kegiatan SPM Penyelenggaraan penanggulangan urusan sub bencana.
2. Belum sinkronnya antara SPM dengan Renstra SKPD yang telah dibuat, sehingga masih belum terlaksananya SPM dengan maksimal.
3. Dukungan personil yang masih kurang serta peralatan yang belum memadai dalam pelaksanaan SPM sub urusan bencana.
4. Masih kurangnya koordinasi yang baik antar instansi terkait dengan dokumen yang telah dibuat oleh BPBD.

b. Solusi

1. Memaksimalkan anggaran dalam kegiatan berkaitan dengan memenuhi kebutuhan program kegiatan penerapan SPM sub urusan Bencana.
2. Mengadakan rapat rapat dan koordinasi lintas sektor berkaitan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pelaksanaan SPM sub urusan Bencana di Kabupaten Tapin.
3. Penambahan personil yang memiliki keahlian dibidang teknis dan peralatan yang mendukung untuk pelaksanaan SPM sub urusan Bencana.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BPBD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BPBD berdasarkan Rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan		
NO	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Person)	100	4.105.775.438	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Person)	100	4.105.775.438
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar (Dengan Satuan:Person)	100	4.000.000	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar (Dengan Satuan:Person)	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar (Dengan Satuan:Person)	100	4.000.000
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	13	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	13	4.000.000
		Administrasi Keuangan Peranglat Daerah	100	1.035.976.438	Administrasi Keuangan Peranglat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel (Dengan Satuan:person)	100	1.035.976.438
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	12	1.030.976.438	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	12	1.030.976.438
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	2.500.000
		Persentase dokumen Kepegawaian (Dengan Satuan:person)	100	38.500.000	Administrasi Kepegawaian Peranglat Daerah	Persentase dokumen Kepegawaian (Dengan Satuan:person)	100	38.500.000
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2.500.000
		Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan:Paket)	1	36.000.000	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan:Paket)	1	36.000.000
4	Administrasi Umum Peranglat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:person)	100	671.000.000	Administrasi Umum Peranglat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:person)	100	671.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	5.000.000
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	40.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	70.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	35.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	35.000.000
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	5.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	5.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	6.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	6.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	510.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	510.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:person)	100	1.500.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:person)	100	1.500.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	30	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	30	100.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	250.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	250.000.000
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1.000.000.000
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	20	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	20	150.000.000
		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:person)	100	721.299.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:person)	100	721.299.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	2.500.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	159.539.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	159.539.000
			12	559.260.000				12	559.260.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Basmat/Intabahan Daerah	Persentase Aset Terpeliharanya Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:persen)	100	135.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Basmat/Intabahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Basmat/Intabahan Daerah	Persentase Aset Terpeliharanya Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:persen)	100	135.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	12	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	12	100.000.000
			12	35.000.000				12	35.000.000
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat dan aparat yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:persen)	100	630.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat dan aparat yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:persen)	100	630.000.000
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan wawasan informasi kebencanaan (Dengan Satuan:persen)	100	100.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan wawasan informasi kebencanaan (Dengan Satuan:persen)	100	100.000.000
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1	50.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1	50.000.000
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Dengan Satuan:Orang)	250	50.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Dengan Satuan:Orang)	250	50.000.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat dan aparat yang terlatih untuk kesiapsiagaan bencana (Dengan Satuan:persen)	100	385.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat dan aparat yang terlatih untuk kesiapsiagaan bencana (Dengan Satuan:persen)	100	385.000.000
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Dengan Satuan:Orang)	100	50.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Dengan Satuan:Orang)	100	50.000.000
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	12	50.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	12	50.000.000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Dengan Satuan:Unit)	1	50.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Dengan Satuan:Unit)	1	50.000.000
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.000.000
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Dengan Satuan:Kawasan)	1	15.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Dengan Satuan:Kawasan)	1	15.000.000
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Dengan Satuan:Orang)	25	15.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Dengan Satuan:Orang)	25	15.000.000
	Penyusunan Rencana Kontinjensi (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000	Penyusunan Rencana Kontinjensi (Dengan Satuan:Dokumen)	Penyusunan Rencana Kontinjensi (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Dengan Satuan:Orang)	750	25.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Dengan Satuan:Orang)	750	25.000.000
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:Keluarga)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:Keluarga)	50	15.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:Keluarga)	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:Keluarga)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:Keluarga)	50	15.000.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Persentase Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana (Dengan Satuan:persen)	100	114.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Persentase Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana (Dengan Satuan:persen)	100	114.000.000
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Dengan Satuan:Laporan)	1	5.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Dengan Satuan:Laporan)	1	5.000.000

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Dengan Satuan:Orang)	75	2.500.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Dengan Satuan:Orang)	75	2.500.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Dengan Satuan:Orang)	75	50.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Dengan Satuan:Orang)	75	50.000.000
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	2	50.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	2	50.000.000
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.500.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.500.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	31.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Dengan Satuan:persen)	100	31.000.000
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	2.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.000.000
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	2.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.000.000
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	2.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.000.000
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	15.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2	5.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	2	5.000.000
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1	5.000.000	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah maka dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tapin. Maka BPBD Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional.

Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadipenanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani olehBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat danBadan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, yang dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya dalam hal :

- a. mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.
- b. memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:
 - 1) mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 2) menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
- c. melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana,melalui:
 - 1) pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;

- 2) pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 3) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
 - 4) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi :
- 1) pangan;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 4) sandang;
 - 5) penampungan dan tempat hunian sementara; dan
 - 6) pelayanan psiko-sosial.
- e. memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik:
- 1) kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.

Disamping itu Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya.
- b. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- c. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana.
- f. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya.
- g. mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
- h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.
- i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik untuk wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga telah diamanatkan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berpedoman pada kebijakan baik nasional maupun provinsi maka pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, ditetapkan bahwa BPBD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana harus sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diuraikan diatas maka BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana yaitu :

- ***Bencana***; adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- ***Penyelenggaraan penanggulangan bencana*** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- ***Pencegahan bencana***; merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- ***Kesiapsiagaan***; adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- ***Peringatan dini***; serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

- **Mitigasi;** serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- **Tanggap darurat bencana;** serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.
- **Rehabilitasi;** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- **Rekonstruksi;** adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
- **Wilayah bencana;** adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
- **Daerah rawan bencana** adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-SKPD

Tujuan Renja-SKPD BPBD Kabupaten Tapin dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat maupun pascabencana.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- d. Meningkatkan penggerakan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- e. Meningkatkan pelaksanaan tugas secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Renja-SKPD BPBD Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi.
- b. Terlaksananya koordinasi dengan pihak yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- c. Tersusunnya pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

- d. Tersusunnya standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Tersusunnya prosedur tetap penanganan bencana.
- f. Tersedianya peta daerah rawan bencana.
- g. Tersusunnya laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dalam kondisi normal maupun kondisi darurat bencana.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD pada tahun 2025 sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2025.

Tabel. T-III.1.
 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana
 Kabupaten Tapin

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2025	Kondisi Akhir Periode
Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	0,33	0,30
	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,46	0,49
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	76,45
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	60	70

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin.

Rencana kerja, program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Tahun
Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

RENCANA USULAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN TA 2025

KABUPATEN/ KOTA :						
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu	Catatan Usulan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	100	5.670.329.406	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	100	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	13	4.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel (Dengan Satuan:persen)	100	2.600.530.406	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	12	2.595.530.406	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.500.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	2.500.000	APBD

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen Kepegawaian (Dengan Satuan:persen)	100	38.500.000		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2.500.000		APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	36.000.000		APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:persen)	100	671.000.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	5.000.000		APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	40.000.000		APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	70.000.000		APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	35.000.000		APBD
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	5.000.000		APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	6.000.000		APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	510.000.000		APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:persen)	100	1.500.000.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	30	100.000.000		APBD
	Pengadaan Mebel	Kab. Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	250.000.000		APBD
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1.000.000.000		APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	20	150.000.000		APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:persen)	100	721.299.000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	2.500.000		APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	159.539.000		APBD

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laboran)	12	559.260.000		APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Aset Terpeliharanya Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:persen)	100	135.000.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	12	100.000.000		APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	12	35.000.000		APBD
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase masyarakat dan aparaturnya yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:persen)	100	630.000.000		
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Persentase masyarakat yang mendapatkan wawasan informasi kebencanaan (Dengan Satuan:persen)	100	100.000.000		APBD
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000		APBD
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Dengan Satuan:Orang)	250	50.000.000		APBD
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase masyarakat dan aparaturnya yang terlatih untuk kesiapsiagaan bencana (Dengan Satuan:persen)	100	385.000.000		
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000		APBD
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Dengan Satuan:Orang)	100	50.000.000		APBD
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	12	50.000.000		APBD

	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tapin	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Dengan Satuan:Unit)	1	50.000.000		APBD
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.000.000		APBD
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Tapin	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Dengan Satuan:Kawasan)	1	15.000.000		APBD
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Dengan Satuan:Orang)	25	15.000.000		APBD
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000		APBD
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tapin	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Dengan Satuan:Orang)	750	25.000.000		APBD
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	50.000.000		APBD
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Tapin	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:Keluarga)	50	15.000.000		APBD
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana (Dengan Satuan:persen)	100	114.000.000		
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Dengan Satuan:Laporan)	1	5.000.000		APBD
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000		APBD
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Dengan Satuan:Orang)	75	2.500.000		APBD
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Dengan Satuan:Orang)	75	50.000.000		APBD
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	2	50.000.000		APBD

	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Tapin	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1.500.000		APBD
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase terlaksananya Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Dengan Satuan:persen)	100	31.000.000		APBD
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.000.000		APBD
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.000.000		APBD
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2.000.000		APBD
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Tapin	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	15.000.000		APBD
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	2	5.000.000		APBD
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000		APBD
	Usulan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Operasional Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapin	Kab. Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kebutuhan operasional BPBD Tapin (Dengan Satuan: Unit)	647	14.439.748.300		APBN

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan inventarisasi permasalahan bencana dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan baik nasional maupun provinsi.

Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna tercapainya tujuan, sasaran, program-program pembangunan yang berpedoman terhadap RPJMD Kabupaten Tapin serta mengacu kepada Renstra SKPD dan Rancangan RKPD. Pelaksanaan kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD tersebut.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah.

PJ. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd

LAMPIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.708.792.302,00			-	02. Pemantapan apapun Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-	-	3.107.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2.701.068.782,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan apapun Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		3.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.651.520,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Pemantapan apapun Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4.072.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan apapun Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	-		4.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REINSTR TAHUN 2023	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET REINSTR OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu			12 Laporan	14.162.500,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Perekonomian Optimalisasi Terdidukung dan sosial dan pembe dayaan masyarakat	-	7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.06.0003	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	752.842.800,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kual/ias Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Sang Optimalisas i perindung an sosial dan pembe dayaan masyarakat	-	750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.494.039.692,00				-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Optimalisas i perindung an sosial dan pembe dayaan masyarakat	-	2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.061.500,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Optimalisas i perindung an sosial dan pembe dayaan masyarakat			4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	196.093.750,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Optimalisas i perindung an sosial dan pembe dayaan masyarakat			210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	852.481.560,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Optimalisas i perindung an sosial dan pembe dayaan masyarakat			620.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	376.633.200,00			-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saling Optimalisasi lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	-	-	172.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlthara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya				20 Unit	302.951.700,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saling Optimalisasi lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	-		140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlthara				15 Unit	73.686.500,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saling Optimalisasi lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	-		32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	5.122.961.778,00					-	-	2.922.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	602.140.000,00			-	05. Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup Mendukung Ketahanan Bencana Mengoptimalkan pang awasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup	-	-	430.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				40 Orang	382.140.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup Mendukung Ketahanan Bencana Mengoptimalkan pang awasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup	-		330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0008		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legit paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup Mendukung Ketahanan Bencana Mengoptimalkan pang awasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten sampai dengan implementasi satu (satu) tahun pertama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	14.940.500,00	Kab. Tapin, Kecamatan, Samudra KidulDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Meningkatkan ketahanan penyelenggaraan lingkungan hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Optimalisas i perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
J U M L A H							11.859.088.500,00						10.044.000.000,00			

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENCANA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN MONEV TRIWULAN IV
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2023		Unit Penanggung Jawab																									
				I				II		III		IV			K	Rp (Ribu)	K		Rp (Ribu)	K (%)		Rp (%)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)																				
				8	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K														Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)	K	Rp (Ribu)													
1	2	3	4	7				9		10		11		12-3		13-12/7*100			14-12		15-13																									
				K	%	Rp (Ribu)	K	%	Rp (Ribu)	K	%	Rp (Ribu)	K	%	Rp (Ribu)	K	%	Rp (%)	K	%	Rp (Ribu)	K	%	Rp (Ribu)																						
		1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%	4.605.482.465	25	%	1.159.333.678	50	%	1.957.183.123	75	%	2.952.476.356	100	%	4.014.542.664	100	%	4.014.542.664	100	%	4.014.542.664	100	87,17	87,188775																			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,45	Nilai													92,87	Person																											
			Indeks Profesionalisme ASN	70	Nilai													37,71	Person																											
		1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	13	Dokumen	2.929.970	5	Dokumen	0	8	Dokumen	0	11	Dokumen	1.100.000	13	Dokumen	1.100.000	100,00	37,54	13	Dokumen	1.100.000	100,00	37,54	37,54																				
		1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Dokumen	2.929.970	5	Dokumen	0	8	Dokumen	0	11	Dokumen	1.100.000	13	Dokumen	1.100.000	100,00	37,54	13	Dokumen	1.100.000	100,00	37,54	37,54																				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								100,00	37,54																					
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								ST	SR																					
		1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	%	2.772.301.728	25	%	757.935.858	50	%	1.305.712.966	75	%	1.804.636.508	100	%	2.235.937.697	100,00	80,65	100,00	2.235.937.697	100,00	2.235.937.697	100,00	80,65	80,65																			
		1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	2.768.424.139	3	Bulan	757.935.858	6	Bulan	1.305.712.966	9	Bulan	1.804.636.508	12	Bulan	2.232.617.697	100,00	80,65	12	Bulan	2.232.617.697	100,00	80,65	80,65																				
		1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	1.052.720	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	605.000	1	Dokumen	605.000	100,00	57,47	1	Dokumen	605.000	100,00	57,47	57,47																				
		1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	4	Laporan	2.824.869	1	Laporan	0	2	Laporan	0	3	Laporan	2.715.000	4	Laporan	2.715.000	100,00	96,11	4	Laporan	2.715.000	100,00	96,11	96,11																				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								100,00	78,08																					
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								ST	T																					
		1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perantoran	100	%	750.571.048	25	%	134.211.133	50	%	248.339.699	75	%	522.372.667	100	%	749.270.455	100,00	99,83	100,0 %	749.270.455	100,00	749.270.455	100,00	99,83	99,83																			
		1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	6.423.940	1	Paket	0	1	Paket	225.000	1	Paket	4.474.000	1	Paket	6.402.000	100,00	99,66	1	Paket	6.402.000	100,00	99,66	99,66																				
		1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	#	1	Paket	10.791.050	1	Paket	12.427.050	1	Paket	25.888.050	1	Paket	39.576.990	100,00	99,30	1	Paket	39.576.990	100,00	99,30	99,30																				
		1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	#	#	Paket	11.880.000	1	Paket	23.092.500	1	Paket	46.852.500	1	Paket	75.104.500	100,00	99,90	1	Paket	75.104.500	100,00	99,90	99,90																				
		1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	1	Paket	#	#	Paket	900.000	1	Paket	900.000	1	Paket	16.175.900	1	Paket	24.230.900	100,00	74,27	1	Paket	24.230.900	100,00	74,27	74,27																				
		1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1	Paket	#	#	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	1	Paket	5.980.000	100,00	98	1	Paket	5.980.000	100,00	98,47	98,47																				
		1.05.01.2.06.08 Fasilitas Kunlungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas Kunlungan Tamu	5	Laporan	5.948.250	0	Laporan	0	2	Laporan	1.900.000	4	Laporan	1.900.000	5	Laporan	5.915.000	100,00	99,44	5	Laporan	5.915.000	100,00	99,44	99,44																				
		1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	584.465.000	3	Laporan	110.640.083	6	Laporan	209.795.149	16	Laporan	427.082.217	20	Laporan	592.061.065	100,00	101,30	20	Laporan	592.061.065	100,00	101,30	101,30																				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																								100,00	96,05																					
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																								ST	ST																					
		1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasana Aparatur Dalam kondisi baik	100	%	170.416.380	25	%	95.260.000	50	%	95.260.000	75	%	95.260.000	100	%	165.260.000	100,00	96,97	100,0 %	165.260.000	100,00	165.260.000	100,00	96,97	96,97																			

	1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	20	Unit	107.279.154	3	Unit	37.030.000	6	Unit	37.030.000	6	Unit	37.030.000	20	Unit	107.030.000	100,00	99,77	20	Unit	107.030.000	100,00	99,77
	1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Unit	#	3	Unit	58.230.000	6	Unit	58.230.000	6	Unit	58.230.000	5	Unit	58.230.000	100,00	92,23	5	Unit	58.230.000	100,00	92,23
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit kerja yang mendapatkan pelayanan Administrasi Pemerintahan	100 %		696.757.937	25	%	144.063.656	50	%	243.802.204	75	%	442.457.303	100 %		673.336.836	100,00	96,64	100,0 %		673.336.836	100,00	96,64
	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menusut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menusut	12	Laporan	2.357.530	3	Laporan	0	6	Laporan	1.800.000	9	Laporan	1.800.000	12	Laporan	2.300.000	100,00	97,56	12	Laporan	2.300.000	100,00	97,56
	1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	#	3	Laporan	13.563.656	6	Laporan	24.302.204	9	Laporan	46.435.703	12	Laporan	64.935.236	100,00	93,25	12	Laporan	64.935.236	100,00	93,25
	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	624.766.307	3	Laporan	130.500.000	6	Laporan	217.500.000	9	Laporan	334.221.600	12	Laporan	606.101.600	100,00	97,01	12	Laporan	606.101.600	100,00	97,01
	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan Prasarana Aparatur Dalam kondisi baik	100 %		212.505.402	25	%	27.863.031	50	%	64.068.254	75	%	96.539.878	100 %		189.637.676	100,00	89,24	100,0 %		189.637.676	100,00	89,24
	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	unit	187.155.402	3	unit	25.388.031	3	unit	59.643.254	7	unit	80.447.358	8	unit	165.365.156	100,00	89,36	21	unit	165.365.156	100,00	89,36
	1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	25	unit	25.350.000	3	unit	2.475.000	6	unit	4.425.000	21	unit	16.152.520	25	unit	24.272.520	100,00	95,75	55	unit	24.272.520	100,00	95,75
	1.05.03 PROGRAM PEANGKULANGAN BENCANA	Indeks Risiko Bencana	100	%	972.950.936	25	%	0	50	%	0	75	%	0	100 %		868.901.450	100	89,30	100 %		868.901.450	100	89,30465
		Indeks Kapasitas Daerah	0,33	Point												0,495	Point	66,63	Person					
		Meningkatkan Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan bencana. Menurunkan Indeks Risiko bencana. Perentase Daerah terdampak bencana yang pulih, persentase desa tangguh bencana	0,46	Point												0,56	Point	121,74	Person					
	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilagiasi	100	%	203.187.250	25	%	0	50	%	0	75	%	0	100 %		172.429.000	100	84,86	100 %		172.429.000	100	84,862116
	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilagiasi	1	Dokumen	141.690.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	128.940.000	100	91	1	Dokumen	128.940.000	100	91,001482
	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, ME Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi, ME Rawan Bencana Kab/Kota	50	orang	61.497.250	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	50	orang	43.489.000	100	71	50	orang	43.489.000	100	70,71993
	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Terhadap Bencana	Meningkatkan Indeks kapasitas daerah dalam Penanggulangan bencana. Menurunkan Indeks Risiko bencana. Persentase Daerah terdampak bencana yang pulih, persentase desa tangguh bencana	100 %		622.731.800	25	%	144.063.656	50	%	-	75	%	-	100 %		592.315.500	100,00	95,12	100,0 %		592.315.500	100,00	95,12
	1.05.03.2.02.2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	70	orang	39.370.500	0	orang	0	0	orang	-	0	orang	-	70	orang	30.209.500	100,00	76,73	70	orang	30.209.500	100,00	76,73
	1.05.03.2.02.4 Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2	unit	#	0	unit	13.563.656	0	unit	-	0	unit	-	2	unit	495.774.000	100,00	99,39	2	unit	495.774.000	100,00	99,39
	1.05.03.2.02.8 Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang dilakukan penguatan kapasitas untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	1	Kawasan	84.541.300	0	Kawasan	130.500.000	0	Kawasan	-	0	Kawasan	-	1	Kawasan	66.332.000	100,00	78,45	1	Kawasan	66.332.000	100,00	78,45
		Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)															100,00	84,65						
		Predikat Kinerja Sub Kegiatan															ST	T						

[illegible]